

Kedudukan Anak Angkat Sebagai Ahli Waris Dalam Sengketa Hak Atas Tanah

Fitria Dewi Navisa, Alfat Hoki Sri Meliana Dewi
Fakultas Hukum-Universitas Islam Malang
Jl. MT. Haryono No. 193 Malang, 65144, 0341 551932, Fax: 0341 552249
navisa@unisma.ac.id

Abstrak

Jurnal atau penelitian ini adalah untuk mengetahui kedudukan ahli waris dalam sengketa hak milik tanah dengan ahli waris yang merupakan anak angkat pewaris dalam proses berpekerja dalam peradilan dan bagaimana kedudukan tanah yang bersengketa. Dengan menggunakan penelitian yuridis-normatif. Bahwa hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan atas harta peninggalan pewaris kemudian menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan menentukan bagian masing-masing ahli waris yang mengacu pada hukum perdata.

Teori yang di gunakan pada jurnal ini adalah teori kepastian hukum dan teori keadilan, kepastian adalah keadaan yang pasti, ketentuan atau ketetapan hukum secara hakiki harus pasti dan adil. kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif bukan sosiologi. Menurut kelsen hukum adalah sebuah sistem norma, norma adalah pernyataan yang menekankan aspek seharusnya atau *das sollen* dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus di lakukan.

Menggunakan pendekatan konsep, pendekatan konsep adalah pendekatan yang mengarahkan peserta didik menguasai konsep secara benar dengan tujuan agar tidak terjadi kesalahan konsep. Konsep adalah klarifikasi yang memiliki ciri – ciri tertentu yang sama.

Hukum perdata menjelaskan bahwa setiap orang berhak menerima warisan atau menjadi ahli waris dari setiap harta yang di tinggal kan oleh pewaris atau orang yang memiliki hubungan hukum yang secara hukum keluarga ataupun hukum kekayaan yang memiliki hubungan yang kuat dan erat di antara pewaris dan ahli pewaris yang di maksud.

Kedudukan tanah dalam status sengketa sangat rentan terjadinya permasalahan permasalahan yang menjadi akibat hukum bagi kedua belah pihak ataupun para dan pihak yang bersangkutan.

Kata Kunci: Waris, Anak Angkat

I. PENDAHULUAN

Manusia disebut sebagai seorang individu yaitu subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban. Bahkan bayi yang masih dalam kandunganpun dengan catatan dilahirkan hidup sudah mempunyai hak dan kewajiban (Pasal 2 KUHPdt). Dalam perjalannya hidupnya, manusia dipertemukan dengan manusia yang lain dan menjalin suatu hubungan yang disebut pernikahan. Pernikahan yaitu hubungan lahir batin antara seorang pria dengan seorang sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.¹

Didalam sebuah ikatan perkawinan, akan membentuk sebuah keluarga inti yaitu suami, istri dan anak-anak mereka. Dalam hubungan keluarga timbul hak-hak dan kewajiban masing-masing baik sebagai suami / istri atau anak.

Mengingat bahwa semua makhluk hidup pasti akan mengalami kematian, begitupun dengan manusia, manusia tidak hidup abadi. Pada suatu saat pasti akan menemui ajalnya, dia akan kembali kepada Tuhan yang maha esa yang menciptakannya. Dengan demikian, akibat dari suatu kematian seseorang akan timbul permasalahan bagaimana dengan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal (pewaris) tersebut? Siapakah yang berhak mewarisinya?

Kewarisan merupakan bagian integral dari hukum kekeluargaan yang memegang peranan penting dalam suatu sistem sosial masyarakat. Hal ini disebabkan karena hukum kewarisan itu sendiri hukum yang mengatur tata tertib kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat. Menurut Soepomo, Hukum Waris itu memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tak berwujud benda dari suatu angkatan manusia kepada turunannya.

Ketika seseorang meninggal dunia, maka secara langsung akan terjadi peralihan harta waris dari pewaris kepada ahli warisnya. Ahli waris adalah orang yang berhak menerima harta warisan yaitu anak kandung asli dari istri atau suami yang meninggal tersebut. Namun, apabila seseorang yang meninggal itu meninggalkan anak angkat, maka akan terjadi perselisih dalam keluarga yang ditinggalkan pewaris. Keberadaan anak angkat yang ditinggalkan pewaris dalam

¹Pasal 1 UU No, 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

keluarga akan menjadi perdebatan para ahli waris (anak kandungnya). Hal ini dapat menimbulkan suatu sengketa kewarisan.

Apabila seorang pewaris meninggalkan harta yang banyak, maka pembagian harta tersebut harus dibagi dengan adil sesuai dengan hukum kewarisan yang akan digunakan oleh keluarga pewaris baik itu hukum kewarisan adat, hukum waris islam, maupun hukum waris perdata. Salah satu hal yang paling sering terjadi dimasyarakat adalah perselisihan antar ahli waris yang memperebutkan mengenai tanah warisan dari pewaris. Semua ahli waris saling mengklaim satu sama lain.

Di Indonesia pengangkatan anak telah menjadi kebutuhan masyarakat dan menjadi bagian dari sistem hukum kekeluargaan, karena menyangkut kepentingan orang perorang dalam keluarga.

Sengketa dalam kehidupan sehari-hari – hari memang sudah sering kita jumpai dan sangat berkaitan dengan perkembangan hukum. Sengketa merupakan pertentangan atau konflik yang terjadi antara individu - individu atau kelompok-kelompok yang mempunyai hubungan dan kepentingan yang sama atas objek kepemilikan, yang menimbulkan akibat hukum antara yang satu dengan yang lain.² Sengketa dapat bersifat perdata atau pun publik, bisa terjadi antara individu dengan individu, kelompok dengan kelompok, ataupun individu dengan kelompok, dapat terjadi pula antar perusahaan, antar negara yang satu juga dengan negara yang lainnya.

Sengketa adalah suatu perkara perdata yang terjadi antara para pihak yang bersengketa didalamnya mengandung sengketa yang harus diselesaikan oleh kedua belah pihak. Dan perkara Perdata (Permohonan Penetapan) yang di dalamnya tidak mengandung sengketa bukanlah masuk dalam pengertian sengketa tersebut karena permohonan penetapan suatu hak di maksudkan untuk memperkuat adanya hak pemohon.

Di dalam kehidupan satu keluarga tiap – tiap individu atau orang mempunyai kepentingan yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Adakalanya kepentingan mereka itu saling bertentangan, hal mana dapat

² Muchlisin Riadi 23 Okt, 2018 di akses pada 14 April 2020 dari <https://www.kajianpustaka.com/2018/10/pengertian-jenis-penyebab-dan-penyelesaiansengketa.html>

menimbulkan suatu sengketa. Untuk menghindari gejala tersebut, mereka mencari jalan untuk mengadakan tata tertib, yaitu dengan membuat ketentuan atau kaidah hukum yang harus di taati oleh setiap anggota masyarakat agar dapat mempertahankan hidup bermasyarakat. Dalam kaidah hukum itu di tentukan itu setiap orang di haruskan untuk bertingkah laku sedemikian rupa sehingga orang di haruskan untuk bertingkah laku sedemikian rupa, sehingga kepentingan anggota masyarakat lainnya akan terjaga dan di lindungi dan apabila kaidah hukum tersebut di langgar maka kepada yang bersangkutan akan di kenakan sanksi atau hukuman.³

Gustav Radbruch menyatakan bahwa hukum itu merupakan suatu unsur budaya maka seperti Unsur – unsur budaya yang lain hukum mewujudkan salah satu nilai dalam kehidupan konkret manusia. Nilai itu adalah nilai keadilan. Hukum yang berarti sebagai hukum jika hukum itu merupakan suatu perwujudan keadilan sekurang kurangnya merupakan usaha ke arah terwujudnya keadilan.⁴

Dalam praktik para pihak yang bersengketa yang di selesaikan disidang pengadilan umumnya sengketannya tentang terjadinya pelanggaran hak yang merugikan pihak lain yang tidak bisa di selesaikan dengan cara damai di luar sidang pengadilan.⁵Masalah sengketa hak atas tanah merupakan hal yang paling sering di temukan dalam hukum acara perdata atau hukum perdata. Secara teoritis pembagian warisannya jika terjadi sengketa harus di lakukan di depan sidang pengadilan. Bukan hanya para pihak termasuk kekuasaannya saja yang terikat pada peraturan, tata cara atau peraruran permainan hukum acara perdata namun hakim yang memeriksa perkara tersebut. Untuk menjatuhkan putusan gugur dan perstek harus di penuhi syarat – syarat tertentu, yang tidak bisa di langgar.

Pengadilan sebagai tempat bagi rakyat pencari keadilan memiliki tugas untuk memutus, memeriksa, dan megadili suatu permasalahan yang sedang disengketakan. Masyarakat memiliki kepercayaan yang tinggi terhadap pengadilan agar dapat membantu menyelesaikan permasalahan dengan

³Ny. Retnowulan Sutantio,S.H. dan Iskandar Oeripkartawinata, S.H. HUKUM ACARA PERDATA dalam teori dan praktek,hlm 1

⁴ Ahmad Ali,2008: 30-31.

⁵MATERI HUKUM,22 feb 2014,di akses pada 15 April 2020 dari <http://hukuum.blogspot.com/2014/02/pengertian-sengketa-perdata.html>

diharapkan dapat menghasilkan putusan yang adil dan memberi kepastian hukum bagi pihak yang bersengketa.

Untuk itu peneliti tertarik untuk membahas mengenai permasalahan ini dengan judul **“Sengketa Hak Atas Tanah Dengan Ahli Waris Anak Angkat”** bagaimana solusi atas permasalahan sengketa tersebut.

II. TEORI

Teori yang di gunakan pada jurnal ini adalah teori kepastian hukum dan teori keadilan, kepastian adalah keadaan yang pasti, ketentuan atau ketetapan hukum secara hakiki harus pasti dan adil.kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif bukan sosiologi.⁶ Menurut kelsen hukum adalah sebuah sistem norma, norma adalah pernyataan yang menekankan aspek seharusnya atau *das sollen* dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus di lakukan.⁷

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan di buat dan di undangkan secara pasri karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu ragan dan logis. Jelas dalam artian suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma.

Menurut Radbruch, Keadilan berrati menjatuhkan putusan tanpa memandang kedudukan seseorang dan memperlakukan seseorang dengan standar yang sama. Keadilan merupakan nilai hukum, selain kemanfaatan dan kepastian hukum.

Menurut Aristoteles keadilan mesti di pahami dalam pengertian kesetaraan. Namun kesetaraan perlu di bedakan antara kesetaraan numerik dan kesetaraan proposional. Aristoteles juga membedakan keadilan distributif dan keadilan korektif. Keadilan distributif berlaku dalam hukum publik, sementara keadilan korektif berlaku dalam hukum perdata dan pidana.⁸

⁶Dominikus rato, Filsafat Hukum mencari, memahami dan memahami hukum laksbang presindo, yogyakarta,2010,hlmn.59

⁷ Peter mahmud marzuki, pengatar ilmu hukum , kencana, jakarta, 2008 hlmn 158.

⁸Jurnal Yudisial, penegakan keadilan dalam kewarisan beda agama,.vol.8 no. 3 Desember 2015, hlm273

Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara factual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar sekedar hukum yang buruk.

III. METODOLOGI

Metodologi yang di gunakan pada jurnal ini dengan menggunakan pendekatan yang di berdasarkan hukum atau *yuridis - normatif* mengacu pada pernyataan – pernyataan ataupun ketentuan – ketentuan dalam KUHPerdara terkait sengketa hak atas tanah dengan ahli waris anak angkat.⁹

Dan juga menggunakan pendekatan konsep, pendekatan konsep adalah pendekatan yang mengarahkan peserta didik menguasai konsep secara benar dengan tujuan agar tidak terjadi kesalahan konsep. Konsep adalah klarifikasi yang memiliki ciri – ciri tertentu yang sama. Konsep merupakan struktur mental yang di peroleh dari pengamatan dan pengalaman.tahapan pendekatan konsep :

1. Tahap enaktif.
2. Tahap simbolik.
3. Tahap ikonik.¹⁰

IV. HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

Ahli waris di indonesia telah mencoba memberikan rumusan mengenai pengertian hukum waris yang di susun dalam bentuk batasan (Definisi). Sebagai pedoman dalam upaya memahami pengertian hukum waris secara utuh, ada beberapa definisi mengenai waris dan hukum waris yang di berikan oleh beberapa sarjana.

Wirjono Prodjodikoro, rumusan warisan adalah soal apakah dan bagaimanakah berbagai hak – hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang yang masih hidup¹¹

Menurut soepomo memberikan rumusan hukum waris yaitu: hukum waris memuat peraturan peraturan yang mengatur proses meneruskan serta

⁹Esca Sari Ayu Wulandari.,Sanksi Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Tuduhan Tanpa Alat Bukti Dalam Kajian Komparatif Fiqh Jinayah dan Kitab Undang – Undang Hukum Pidana; Skripsi.,hlmn12.

¹⁰Wijayanti, Konsep dasar pendekatan, 2015 di akses pada 3 mei 2020 dari : <http://20305891.siap-sekolah.com/2015/05/13/konsep-dasar-pendekatan-strategi-metode-teknik-taktik-dan-model-pembelajaran/#.XrFlxagza00>

¹¹Wirjono Prodjodikoro, hukum perdata tentang persetujuan tertentu, sumur bandung,bandung,1991,hlmn,8.

mengoperkan barang – barang harta benda dan barang – barang tidak berwujud bendadari satu angkatan manusia kepada keturunannya, proses ini telah mulai pada waktu orang tua masih hidup. Proses tersebut akan menjadi “akut” oleh sebab orang tua meninggal dunia. Memang meninggal nya bapak atau ibu adalah suatu peristiwa yang penting bagi proses itu, akan tetapi sesungguhnya tidak mempengaruhi secara radikal proses perumusan dan pengoperan harta benda dan harta bukan benda tersebut.¹²

Ketentuan ketentuan mendaji ahli waris menurut hukum waris perdata yaitu :

1. Memiliki hak atas harta

- *Ab intestato*, Maksudnya ahli waris yang mendapatkan bagian menurut ketentuan yang di atur dalam undang – undang, misalnya ahli waris anak, suami, istri, kakek, nenek, sebagaimana di atur dalam ahli waris golongan I sampai IV.
- *Testameter* maksudnya ahli waris yang mendapatkan bagian berdasarkan wasiat dari pewaris yang di buat sewaktu hidupnya
- Perhatikan ketentuan pasal 2 Kuhperdata memuat ketentuan bahwa anak yang masih dalam kandungan ibunya dianggap telah di lahirkan apabila untuk kepentingan si anak dalam menerima bagian dalam warisan.

2. Dinyatakan patut mewaris

Menurut pasal 838 KUHPdata seseorang yang di anggap tidak patut untuk mewaris dari pewaris adalah sebagai berikut :

- Mereka yang telah dihukum karena membunuh atau melakukan percobaan pembunuhan terhadap pewaris
- Mereka yang pernah di vonis bersalah karena memfitnah pewaris telah melakukan kejahatan yang di ancam hukuman lima tahun atau lebih
- Mereka yang mencegah pewaris untuk membuat surat wasiat
- Mereka yang terbukti menggelapkan, merusak, atau memalsukan surat wasiat dari pewaris.

Ahli waris juga mempunyai hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban ahli waris timbul setelah pewaris meninggal dunia.hak dan kewajiban tersebut

¹²Soepomo, Bab- bab tentang hukum adat, penerbitan universitas , Jakarta,1996,hlm, 72 -

didasarkan pada hubungan perkawinan, hubungan darah dan surat wasiat yang diatur dalam KUHPdt, agama, dan hukum adat. Akan tetapi, legataris bukan ahli waris walaupun dia berhak atas harta peninggalan pewaris karena bagiannya terbatas pada hak atas benda tertentu tanpa kewajiban. Menurut ketentuan pasal 833 KUHPdt ayat 1, semua ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala harta kekayaan peninggalan pewaris. Pasal 874 KUHPdt juga menentukan bahwa segala harta kekayaan peninggalan pewaris adalah milik semua ahli waris sesudah dikurangi wasiat berdasarkan ketetapan yang sah.

Setiap ahli waris berhak menuntut dan memperjuangkan hak warisnya (pasal 834 KUHPdt). Tuntutan ini disebut hereditas petito, artinya tuntutan memperoleh hak waris. Menurut ketentuan pasal 1066 ayat 2 KUHPdt, setiap ahli waris dapat menuntut pembagian harta warisan walaupun ada larangan untuk melakukan itu. Jadi harta warisan itu tidak mungkin dibiarkan dalam keadaan tidak terbagi, kecuali jika diperjanjikan tidak diadakan pembagian dan ini pun tidak lebih lama dari lima tahun.¹³

Definisi pengangkatan anak terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, pengertian adopsi atau pengangkatan anak dirumuskan sebagai berikut : Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga anak angkat.¹⁴

Anak angkat adalah anak yang bukan keturunan dari suami istri namun diambil dipelihara dan diperlakukan seperti halnya anak keturunannya sendiri sehingga antara anak yang mengangkat dan orang yang mengangkat anak tersebut timbul suatu hubungan kekeluargaan yang sama seperti yang ada antara orang tua dan anak kandungnya sendiri.¹⁵

¹³Prof. Abdulkadir Muhammad, S.H., *Hukum Perdata Indoensia*, PT Citra Aaditya Bakti, Bandung : 2014, Hlm 212.

¹⁴ Djaja S Meliala, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang dan Hukum Perdata*, NuansaAulia, Bandung, 2015, hal. 83.

¹⁵ D.Y. Witanto, *Hukum Keluarga Hak Dan Kedudukan Anak Luar Kawin*, Pustakaraya Jakarta Indonesia, Jakarta, 2012, hal. 48.

Anak angkat ialah seorang anak bukan hasil keturunan dari kedua orang suami istri, yang di pungut, di rawat serta di anggap oleh orang tua angkatnya sebagai anak keturunannya sendiri.¹⁶ Undang – undang nomor 23 tahun 2002¹⁷ tentang perlindungan anak, memberikan istilah tentang anak dan dari masing – masing istrilah tersebut dapat memberikan konsepsi yang berbeda – beda.

Dalam pasal 1 dapat di temukan beberapa istilah di maksu yaity: anak terlantar, anak yang emnyandang cacat, anak yang memiliki keunggulan, anak angkat, anak asuh. Anak angkat di berikan definisi sebagai berikut anak yang haknya di alihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lsin yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan atau penetapan pengadilan.¹⁸

Dasar hukum pengangkatan anak ada berapa hal atau peraturan hukum yang adapat di jadikan rujukan bagi hakim dalam menjalankan tugas pokok kekuasaan kehakiman tentang pengangkatan anak.¹⁹

Misalnya :

- Staatsblad 1917 nomor 129, pasal 5 sampai pasal 15 mengatur masalah adopsi²⁰ yang merupakan kelengkapan dari KUHPdata/BW yang ada dan khusus berlaku bagi golongan masyarakat keturunan tionghoa.
- Surat edaran mahkamah agung RI (SEMA) nomor 2 tahun 1979, tentang pengangkatan anak²¹ yang mengatur prosedur hukum mengajukan permohonan pengesahan dan atau permohonan pengangkatan anak memeriksa dan mengadilinya oleh pengadilan.
- Surat edaran mahkamah agung RI (SEMA) nomor 6 tahun 1983²² tentang penyempumaan surat edaran mahkamah agung (SEMA) nomor 2 tahun 1979, yang muali berlaku sejak tanggal 30 september 1983.

¹⁶Oemaesalim,2006:28

¹⁷Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang perlindungan anak

¹⁸AGUSTINA MANGA MANTUNG

¹⁹H.AHMAD KAMIL,2008:53

²⁰Staatsblad 1917 nomor 129, pasal 5 sampai pasal 15 mengatur masalah adopsi.

²¹SEMA nomor 2 tahun 1979, tentang pengangkatan anak

²²SEMA nomor 6 tahun 1983

- Keputusan menteri sosial RI nomor 41/HUK/KEP/VII/1984 2002 tentang petunjuk pelaksanaan perizinan pengangkatan anak yang mulai berlaku sejak tanggal 14 juni 1984.
- Bab VIII bagian kedua dari Undang – undang Nomor 23 tahun 2002²³ tentang perlindungan anak yang mulai berlaku sejak tanggal 22 Oktober 2002.
- Surat edaran mahkamah agung RI (SEMA) nomor 3 tahun 2005²⁴ setelah terjadinya bencana alam gempa bumi dan gelombang tsunami yang melanda aceh dan nias, yang menimbulkan masalah sosial berupa banayknya anak – anak yang kehilangan orang tuanya dan ada keinginan sukarelawan asing untuk mengangkatnya sebagai anak angkat oleh LSM dan Badan Keagamaan lainnya yang sangat membahayakan akidah agama anak tersebut.
- Undang – undang nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas undang – undang nomor 7 tahun 1989 tentng peradilan agama. Pada pasal 49 huruf a angka 20 menyatakan bahwa pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang – orang yang beragama islam di bidang “ penetapan asal usul seorang anak dan penetapan perkara yang sama berdasarkan hukum islam”.
- Beberapa yurisprudensi mahkamah agung dan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang dalam praktik peradilan telah diikuti oleh hakim - hakim berikutnya dalam memutuskan atau menetapkan perkara yang dama, secara berulang – ulang dalam waktu yang lama sampai saat ini.

Tata cara pengangkatan anak ini diatur oleh Pasal 8 sampai 10 Staatsblad 1917 nomor 129 Pada pasal 8 menyebutkan empat syarat mengangkat anak yaitu:

1. Jika anak yang diangkat itu adalah anak yang sah dari orang tuanya, maka diperlukan izin orang tua itu jika bapaknya sudah wafat dan ibunya sudah kawin lagi, maka harus ada persetujuan dari walinya dan balai harta peninggalan selaku penguasa wali.
2. Jika anak yang diangkat itu adalah lahir diluar perkawinan, maka diperlukan izin dari orang tuanya yang mengakui sebagai anak, maka harus ada persetujuan dari walinya serta dari balai harta peninggalan.

²³Undang – undang Nomor 23 tahun 2002

²⁴SEMA nomor 3 tahun 2005

3. Jika anak yang akan diangkat itu sudah berusia 19 tahun, maka diperlukan persetujuan dari anak itu sendiri.
4. Manakala yang akan mengangkat anak itu seorang janda, maka harus ada persetujuan dari saudara laki-laki dan ayah dari almarhuma suaminya, atau tidak ada saudara laki-laki ayah yang masih hidup, atau jika mereka tidak menetap di Indonesia, maka harus ada persetujuan dari anggota laki-laki, dari keluarga almarhuma suaminya dalam garis laki-laki sampai derajat keempat.

Dalam *staatblaad* 1917 no,129²⁵, akibat hukum dari pengangkatan anak adalah anak tersebut secara hukum memperoleh nama dari bapak angkat, di jadikan sebagai anak yang di lahirkan dari perkawinan orang tua angkat dan menjadi ahli waris orang tua angkat. Artinya akibat pengangkatan anak tersebut maka terputuslah segala hubungan perdata, yang berpangkal pada keturunan karena kelahiran, yaitu antara orang tua kandung dan anak tersebut.²⁶

Dalam *Staatsblad* Nomor 129 Tahun 1917 Pasal 5 sampai dengan Pasal 15, kedudukan anak angkat terdapat pada Pasal 12 yang menyamakan “seorang anak angkat dengan anak yang sah dari perkawinan orang yang mengangkat”.

Dengan demikian, anak angkat didalam keluarga mempunyai kedudukan yang sama dengan anak kandung atau anak yang terlahir dari orang tua angkatnya. Hal itu pun berakibat terhadap kesamaan hak dan kewajiban yang dimiliki oleh anak angkat termasuk pada pembagian harta warisan orang tua angkatnya apabila meninggal dunia. Jadi kedudukan anak angkat dalam menerima harta warisan sama dengan anak sah seperti tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 42 menyatakan bahwa: Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Begitu juga dengan anak angkat walaupun bukan anak sah tetapi mempunyai kedudukan yang sama dimata hukum terutama dalam pembagian harta warisan.²⁷ Akan tetapi dalam KUHPdt tidak mengatur mengenai pengangkatan anak, anak angkat juga tidak diakui dalam hal kewarisan, yang terdapat pada pasal 852 ayat 1 KUHPdt “anak-anak atau sekalian keturunan mereka, biar dilahirkan dari lain-

²⁵Staatblaad 1917 no,129

²⁶IRMA DEVITA,di akses pada 19 April 2020 dari : <https://irmadevita.com/2012/apakah-anak-angkat-anak-adopsi-berhak-mewaris/>

²⁷Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

lain perkawinan sekalipun mewaris dari kedua orang tua, kakek, nenek, atau semua keluarga sedarah mereka selanjutnya adalah garis lurus keatas, dengan tidak perbedaan antara laki atau perempuan dan tidak perbedaan berdasarkan kelahiran lebih dulu.”

Jadi, dalam hal apabila pewaris mewariskan hartanya kepada ahli waris yang merupakan anak angkat dari pewaris maka hal tersebut tidak dapat dilakukan karena anak angkat tidak termasuk dalam 4 golongan ahli waris dalam Kitab Undang – Undang Hukum Perdata.

Dalam suatu sengketa hak atas tanah dengan ahli waris anak angkat, Dalam Kitab Undang – Undang Hukum Perdata di Indonesia mengenai pembagian ahli waris pasal 852 KUHPerdata ahli waris dibagi menjadi 4 golongan :

- Golongan I : Suami / Istri yang hidup anak atau keturunannya.
- Golongan II : Orang tua dan saudara kandung pewaris.
- Golongan III : Keluarga dalam garis lurus ke atas sesudah bapak dan ibu pewaris.
- Golongan IV : Paman dan Bibi pewaris baik dari pihak bapak maupun dari pihak ibu, keturunan paman dan bibi sampai derajat ke enam di hitung dari pewaris.²⁸

Sehingga apabila golongan 1 tidak ada atau sudah tidak ada maka yang dapat menerima adalah golongan II dan seterusnya. Sengketa yang terjadi hak atas tanah ahli waris anak angkat Anak angkat tidak masuk di dalam golongan yang di sebutkan KUHPerdata. Sehingga untuk anak angkat tidak bisa menerima warisan dari orang tuanya tersebut. Tetapi dalam Kitab Undang - Undang Hukum Perdata untuk anak angkat dapat menerima warisan tetapi dalam bentuk hibah atau wasiat yang di tulis oleh orang tua anak angkat tersebut secara sah dengan jumlah maksimal 1/3.

Dalam perspektif hukum perdata bahwa anak angkat di berikan solusi untuk menerima sesuatu dari orang tua angkatnya yang berupa hibah, menurut ketentuan pasal 957 KUHPerdata, di sebutkan bahwa :

²⁸Irma Devita Purnamasari, S.H., M.Kn di akses pada 14 April 2020 dari <https://hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/1t4ecc7cf50640b/empat-golongan-ahli-waris-menurut-kuh-perdata>

“Hibah wasiat adalah suatu penetapan wasiat yang khusus dengan mana si yang mewariskan kepada seseorang atau lebih memberikan beberapa barang – barangnya bergerak atau tak bergerak atau memberikan hak pakai hasil atas seluruh atau sebagian harta peninggalannya”.

Hak waris anak angkat yang dilaksanakan melalui wasiat wajibah harus terlebih dahulu dilaksanakan dibandingkan pembagian warisan terhadap anak kandung atau ahli waris. Aturan yang menjadi landasan hukumnya terdapat di dalam Pasal 175 KHI, tentang kewajiban ahli waris terhadap pewaris, dimana salah satu kewajibannya tersebut terdapat kewajiban untuk menunaikan segala wasiat dari pewaris. Wasiat ini tetap dilaksanakan, baik diucapkan, atau dikehendaki maupun tidak oleh orang yang meninggal dunia.²⁹

Adapun pemberian wasiat harus memenuhi dua syarat yaitu :

1. Yang wajib menerima wasiat bukan ahli waris. Jika dia berhak menerima pusaka walaupun sedikit, tidaklah wajib wasiat dibuat untuknya.
2. Orang yang meninggal baik kakek maupun nenek, belum memberikan kepada anak yang wajib dibuat wasiat jumlah yang diwasiatkan dengan jalan yang lain seperti hibah umpamanya dan jika dia telah memberikan kurang daripada jumlah wasiat wajibah, maka wajibalah disempurnakan pada saat itu.³⁰

Namun dalam memberikan hibah perlu di perhatikan pula hak asli waris sahnya . jangan sampai untuk itu KUHPerdara menentukan pasal 972 bahwa:

“ apabila warisan tidak seluruhnya atau untuk sebagian diterimanya, atau apabila warisan diterimannya dengan hak istimewa akan pendaftaran harta peninggalan dan yang ini tidak mencukupi guna memenuhi akan segala wasiat, maka hibah – hibah itu dalam keseimbangan dengan besarnya, harus dikurangi, kecuali mewariskan tentang hal ini telah menetapkan ketentuan – ketentuan lain dalam surat wasiatnya”.

Didalam KHI pengaturan mengenai wasiat wajibah disebutkan dalam Pasal 209 ayat (1) dan (2), yang berbunyi sebagai berikut :

1. Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan Pasal 193 di atas, sedangkan bagi orang tua angkat yang tidak menerima

²⁹ Suparno Usman, *Fiqh Mawaris Hukum Kewarisan Islam*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2006, hal. 163

³⁰Ibid, Hlm 99

warisan wasiat wajibah diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan anak angkat.

2. Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah, sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.

Status Kewarisan anak angkat di dalam mata hukum dalam preteknya terkait hukum keluarga terdapat 3 sistem hukum yang dapat menjadi pilihan yaitu hukum adat, hukum perdata formil sebagaimana termuat dalam peraturan perundang - undangan dalam hukum islam. Masing masing warga negara di berikan kebebasan untuk memilih sistem hukum mana yang akan di gunakan terkait hukum keluarga tersebut. Sedangkan bagi seorang anak angkat diantara dirinya dengan pewaris (orang tua angkat) tidak memiliki hubungan darah maupun perkawinan maka hukum tidak berhak untuk menerima warisan dari orangtua angkatnya, namun walau demikian hukum tetap melindungi kedudukan dari anak angkat tersebut, yaitu dengan di perkenannya menerima bagian dari harta peninggalan orang tua angkatnya melalui lembaga hibah wasiat atau wasian wajibah.³¹

Hibah wasiat adalah suatu penetapan khusus di aman pearis memberikan kepada satu atau beberapa orang barang – barang tertentu atau semua barang – barang dan macam misalnya, semua barang – barang bergerak atau barang – barang tetap, atau hak pakai hasil sebagian atau semua barangnya. Perbedaan dengan hibah pada umumnya, hibah wasiat ini baru berlaku dan dapat di lakukan penyerahannya ketika si pemberi hibah telah meninggal dunia.³²

Lain hal dalam peraturan hukum perdata nasional yaitu ada yang disebut *erfstelling* atau pengangkatan ahli waris penunjuk terhadap seseorang atau lebih untuk memperoleh seluruh atau sebagian dari harta warisan pewaris (pasal 954 KUHPerdata). Dengan adanya pertunjukan tersebut kedudukan ahli waris menurut wasiat tersebut kedudukannya sama dengan ahli waris menurut undang – undang. Jadi jika seorang anak ahli waris maka ia memperoleh segala hak kewajiban pewaris.³³

³¹ KANTOR PENGACARA di akses pada 20 April 2020 dari :<https://kantorpengacara.co/bagaimana-status-kewarisan-anak-angkat-di-mata-hukum/>

³²Ibid

³³Ibid

Sengketa hak atas tanah adalah pertentangan atau konflik yang terjadi antara individu - individu atau kelompok kelompok yang mempunyai hubungan dan kepentingan yang sama atas objek kepemilikan, yang menimbulkan akibat hukum antara yang satu dengan yang lain.

Dalam hal seorang ahli waris baik itu ahli waris sah maupun anak angkat, keduanya sama-sama berhak mendapatkan objek waris berupa tanah peninggalan pewaris. Akan tetapi untuk anak angkat hanya bisa mendapatkannya dengan cara hibah maupun wasiat, jika hak itu tidak diberikan oleh pewaris kepada anak angkat maka ahli waris anak angkat tidak bisa mendapatkan hak kewarisannya. Karena tanah yang disengketakan itu adalah hak milik artinya hak yang mutlak, pemilik dapat menguasai sebebas-bebasnya dan dapat melakukan perbuatan apa saja terhadap bendanya. Jika anak angkat memiliki warisan berupa tanah tersebut tanpa adanya proses hibah maupun wasiat, maka ahli waris yang sah dapat mengajukan gugatan untuk diselesaikan perkaranya.

Para pihak ahli waris yang bersengketa untuk memperkuat dalil-dalil yang diajukan karena harus membuktikannya maka juga dapat memberikan alat bukti seperti sertifikat tanah sebagai akta otentik dan saksi-saksi bahwa tanah tersebut merupakan milik yang seharusnya menjadi milik ahli waris yang sah.

Dalam hukum acara perdata menyelesaikan sengketa di bagi dalam dua macam atau cara, pertama melalui jalur pengadilan atau dikenal sebagai jalur litigasi sebagaimana diatur dalam hukum acara perdata. Kedua melalui penyelesaian di luar pengadilan atau jalur non litigasi. Salah satu penyelesaian melalui jalur non litigasi ialah alternatif penyelesaian sengketa.³⁴ Penyelesaian sengketa pada saat ini di pengadilan tidak lagi menjadi pilihan utama karena dianggap tidak cukup efektif dan efisien, karena penyelesaian sengketa dalam pengadilan sering kali menimbulkan permasalahan seperti memakan waktu terlalu lama, tingginya biaya, penyelesaian sengketa, dan juga penyelesaiannya juga harus berpeda pada hukum acara yang berlaku.³⁵

Sistem pembuktian dalam hukum acara perdata, dalam proses perkara memerlukan bukti – bukti yang diajukan oleh pihak penggugat yang menuntut

³⁴BAHASAN.id di akses pada tgl 22 april 2020 dari : <https://bahasan.id/mengenal-penyelesaian-sengketa-melalui-arbitrase/>

³⁵Ibid

hak dan kepentingannya. Para pihak yang masing masing ingin mengajukan bukti – bukti yang di ajukan oleh pihak penggugat yang menuntut hak dan kepentingan hukumnya maupun dari pihak yang menyangkal atau membantah dari pihak tergugat yang juga berusaha mempertahankan dan membuktikan hak dan kepentingannya. Para pihak yang masing – masing ingin mengajukan bukti – bukti untuk dirinya itu hanya mungkin di lakukan dengan cara pembuktian. Tidak semua dalil yang menjadi dasar gugatan harus di buktikan kebenarannya sebab dalil – dalil yang tidak di sangkal apabila diakui sepenuhnya oleh pihak lawan, tidak perlu di buktikan lagi. Dalam soal pembuktian tidak selalu pihak lawan saja yang harus membuktikan dalilnya. Hakim yang memeriksa perkara itu yang akan menentukan siapa saja di antara pihak pihak yang berpekara akan diwajibkan untuk memberikan bukti, apakah itu pihak yang penggugat atau sebaliknya, yaitu pihak tergugat.

Pembuktian yang di lakukan hakim dalam mengadili perkara adalah untuk menentukan hubungan hukum yang sebenarnya terhadap pihak – pihak yang berpekara. Tidak hanya kejadian – kejadian atau peristiwa – peristiwa saja yang dapat di buktikan akan tetapi adanya sesuatu hak juga dapat di buktikan (Teguh Samudera,2004:9).³⁶

Dalam praktek hukum pengadilan perkara waris merupakan salah satu yang berpotensi menimbulkan sengketa kewenangan antara penggugat dan kepada hukum adat, itu karena sengketa waris di anggap sebagai perbuatan melawan hukum.

Hukum pembuktian dalam berpekara merupakan bagian yang sangat kompleks dalam proses ilitigasi. Keadaan kompleksitasnya makin rumit karena pembuktian berkaitan dengan kemampuan merekontruksi kejadian atau peristiwa masa lalu sebagai suati kebenaran . meskipunkebenaran yang di cari dan di wujudkan dalam proses peradilan perdata bukan karena kebenaran yang absolute tetapi bersifat kebenaran relative atau bahkan cukup bersifat kemungkinan namun untuk mencari kebenaran yang demikian puntetap menghadapi kesulitan.³⁷

Dasar – dasar pertimbangan hakim di ambil dalam mengambil keputusan yang adil dan bijak sana adalah dengan memperhatikan alat – alat pembuktian

³⁶Teguh Samudera,2004:9

³⁷Yahya harahap,2011:496

yang di ajukan. Mengenai pembuktian itu sendiri di dalam HIR ketentuannya dapat kita temukan dalam pasal 164 (pasal 1866 KUHPerdara) yang berbunyi :

1. Bukti surat.

Yaitu segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian

2. Bukti saksi.

Keterangan yang diberikan oleh saksi harus tentang peristiwa yang atau kejadian yang dialaminya sendiri, sedang pendapat atau dugaan yang diperoleh secara berfikir tidaklah merupakan kesaksian

3. Persangkaan.

Alat bukti itu termasuk persangkaan atau bukan terletak pada persoalan apakah alat bukti itu memberikan kepastian yang langsung mengenai peristiwa yang diajukan untuk dibuktikan, tetapi ada sangkut pautnya dengan peristiwa yang diajukan dibuktikan

4. Pengakuan.

Merupakan keterangan sepihak, karena tidak memerlukan persetujuan dari pihak lawan

5. Sumpah.

Yaitu suatu pernyataan khidmat yang diucapkan pada waktu memberi janji atau keterangan dengan mengingat akan sifat mahakuasa dari pada Tuhan, dan percaya bahwa siapa yang memberiketerangan atau janji yang tidak benar akan dihukum olehnya.³⁸

Dalam putusan perkara perdata dengan no 59/ pdt.G/2009/PN.Mkl. maka setelah Majelis hakim mempelajari dengan seksama tentang surat gugatan penggugat, demikian pula jawaban, replik, dan duplik yang di ajukan oleh kedua belah pihak.

Asas aksesori ini penting bagi hukum pembuktian berhaknya atau tidak suatu obyek harus dapat di buktikan sesuai dengan alat bukti adalah sesuatu yang belum pernah di ajukan ke persidangan memang sudah fungsi alat bukti. Di

³⁸Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Ed. 8, Liberty, Yogyakarta: 2009, Hlm, 151, 169, 179, 183, 189

simpulkan bahwa kepemilikan dari tanah yang harus dapat di buktikan baik secara non itigasi maupun ilitigasi. Jadi siapapun yang ingin menuntut haknya dalam suatu pengadilan haruslah sekiranya mengumpulkan barang barang buti yang dapat membantu proses kelancaran pengadilan dan kekuatan untuk lebih cepat menyelesaikan perkara tersebut. Peraturan mengenai hukum waris tersebut dapat di jumpai pada pasal 1130 KUHPerdara, meski begitu pengertian hukum waris sendiri tidak dapat di jumpai pada setiap pasal di dalam KUHP erdata yang mengaturnya.

Di dalam hkum waris mengatur tentang peralihan suatu obyek kepada ahli waris sekiranya di kemudian hari pewaris meninggal dunia. Pembagian waris menurut pembagian hukum waris perdata bahwa ketika terbukannya warisan di tandai dengan meninggalnya pewaris. Dalam hukum waris perdata untuk mewarisi harus adanya orang yang meninggal dunia yang di sebut pewaris , ketika subyek memiliki obyek untuk di tinggalkan maka perpindahan hak pun akan terjadi yakni haknya adalah mendapatkan warisan hal ini sesuai dengan apa yang di maksud dengan teori hak yakni haklah yang mendasari semua proses keperdataan.³⁹

Peristiwa kematian menurut hukum mengakibatkan terbukannya warisan dan sebagai konsekwensinya seluruh kekayaan yang tadinya di miliki oleh seorang peninggal harta beralih dengan sendirinyanya kepada segenap ahli warisnya secara bersama – sama. Untuk waktu pelaksanaanya pembagian warisan tidak adanya ketentuan tersendiri dari peraturan waris perdata yaitu yang termuat dalam Kitab Undang – Undang Hukum Perdata. Namun adanya ketentuan mengenai tidak di benarkan harta warisan di biarkan dalam keadaan yang tidak terbagi yang mana di tuangkan dalam KUHPerdara pasal 1066, dalam hal itu maka pembagian akan di utamakan kepada ahli waris yang berhak mendapatkan bagian – bagian itu, menentukan besar bagian yang di dapat, dan menyelesaikan pembagian yang di dapat dengan di laksanakan menggunakan kesepakatan pihak yang berwenang atau yang bersepakat.

Kedudukan tanah warisan yang masih dalam keadaan sengketa yang dapat di mohonkan untuk sita jaminan dengan putusan serta merta tentunya dengan

³⁹Op.,Achmad Ali Dan Wiwie Heryani Hal.118

alasan yang mendesak secara hukum pada dasarnya pelaksanaan putusan serta merta oleh pengadilan negeri beryujuan untuk mempermudah atau mempercepat proses suatu acara pengadilan hukum dengan catatan tebal akibatnya apabila telah memenuhi syarat sebagaimana yang telah ditentukan oleh HIR/RBg. Namun dengan lahirnya SEMA yang terkait dengan penjatuhan putusan serta merta menjadi sulit untuk dilaksanakan, pelaksanaan putusan serta merta pada dasarnya baru dapat di jatuhkan apabila syarat – syarat yang telah ditentukan dalam pasal 191 RBg dan pasal 54 Rv telah terpenuhi walaupun di ajukan perlawanan atau banding dan kasasi.⁴⁰

Suatu putusan untuk memperoleh kekuatan hukum yang tetap di akui memang sering harus menunggu waktu yang lama kadang – kadang sampai bertahun tahun. Namun ada sebuah ketentuan yaitu pasal 180 ayat 1 HIR/ pasal 191 ayat 1 RBg yaitu mengenaiputusan yang pelaksanaannya dapat di jalankan terlebih dahulu meskipun ada banding dan kasasi dengan kata lain bahwa putusan itu belum dapat di laksanakan meskipun putusan itu belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap, hakim berwenang menjatuhkan putusan akhir yang mengandung perintah supaya putusan yang di jatuhkan tersebut, di jalankan terlebih dahulu⁴¹

Dalam praktek tidak sampai satu persen dari harta peninggalan yang di terima sebab bukannya terutama sekali terletak pada formalitas yang di bebaskan oleh undang – undang atas ahli waris akan tetapi penerimaan itu di lihat dari segi masyarakat dapat di anggap sebagai suatu perbuatan mencelah tangga laku. Penerimaan secara umum dan pendapat rakyat adalah bahwa kedudukan keuangan dari pewaris boleh di katakan tidak begitu kuat.⁴²

Penyelesaian sengketa hak atas tanah di pengadilan. Di indonesia sistem hukum yang di gunakan perlu terlebih dahulu di singgung tentang peran (MA) sebagai institusi hukum menurut undang – undang dasar republik indonesia tahun 1945. Dan penyelesaian sengketa di luar pengadilan, tidak perlu di pungkiri lagi dewasa ini aspirasi untuk mengembangkan *alternative dispute resolution* semakin

⁴⁰ Edwin Nehemia Wuisan, sengketa hak milik atas tanah warisan yang di kuasai oleh ahli waris yang bersengketa, 2016

⁴¹ Ibid

⁴² Ibid

banyak, (ADR) memungkinkan penyelesaian sengketa secara informal, sukarela, dengan kerjasama langsung antara kedua belah pihak yang menuju pada pemecahan sengketa yang saling menguntungkan.

V. KESIMPULAN

Dalam jurnal ini suatu putusan yang baik sitematisnya, dengan lain perkataan putusan yang disusun secara baik adalah putusan yang di mulai dengan menyimpulkan terlebih dulu dalil – dalil yang menjadi dasar gugat yang di akui setidak – tidaknya tidak di sangkal oleh pihak tergugat baru kemudian di susul dengan dali – dalil yang di sangkal dan yang menjadi persoalan dalam perkara tersebut.

Dalam pasal 171 KUHPdata di sebutkan bahwa hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan atas harta peninggalan perawis kemudian menentukan siapa – siapa yang berhak menjadi ahli waris dan menentukan berapa bagian masing masing jelaslah dengan mengacu pada hukum perdata menjelaskan bahwa setiap orang berhak menjadi ahli waris dan setiap harta yang di tinggalkan oleh subjek yang memiliki hubungan hukum yang secara hukum keluarga dan ataupun hukum kekayaan yang notabenenya memiliki hubungan erat di antara pewaris dan ahli yang di maksud,

Kedudukan tanah warisan dalam sengketa atau perkara di pengadilan apabila di lihat dari segi kepastian hukum tentunya tanah yang berada dalam status sengketa atau berada dalam keadaan berperkara di pengadilan tentunya perlu adanya putusan pengadilan yang menetapkan kepemilikan tanah dalam sengketa tersebut. Oleh karena itu hal kedudukan tanah dalam status sengketa sangat rentan terjadinya permasalahan – permasalahan yang menimbulkan akibat hukum bagi kedua pihak bersengketa.

VI. SARAN

Perlunya memberikan hukum atau aturan yang seimbang antar anak angkat dengan anak anak lainnya sehingga tidak menimbulkan suatu kesenjangan antara orang – orang yang terikat. dan juga agar pembaca dapat memahami dan mengenal lebih jauh kedudukan dari para ahli waris dan kedudukan tanah warisan dalam sengketa tanah warisan yang bersengketa atau yang sedang dalam perkara di

peradilan agar tidak adanya atau tidak terjadi sengketa hak atas tanah dengan ahli waris anak angkat.

Di harapkan agar mengkaji lebih dalam lagi tentang hal sengketa pada hak atas tanah dengan ahli waris anak angkat ini dengan menyempurnakan undang - undang dalam hal hukum ahli waris dan juga status ahli waris ataupun tanah warisan yang bersengketa. Agar lebih memberikan kejelasan hukum atau kepastian hukum yang memberikan jaminan terhadap kedua belah pihak atau pihak yang bersangkutan.

DAFTAR PUSTAKA

Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Ed. 8, Liberty, Yogyakarta: 2009

BAHASAN.id di akses pada tgal 22 april 2020 dari : <https://bahasan.id/mengenal-penyelesaian-sengketa-melalui-arbitrase/>

D.Y. Witanto, *Hukum Keluarga Hak Dan Kedudukan Anak Luar Kawin*, Pustakaraya Jakarta Indonesia, Jakarta, 2012

Djaja S Meliala, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang dan Hukum Perdata*, NuansaAulia, Bandung, 2015

Dominikus rato, *Filsafat Hukum mencari, memahami dan memahami hukum laksbang presindo*, yogyakarta, 2010

Edwin Nehemia Wuisan, *sengketa hak milik atas tanah warisan yang di kuasai oleh ahli waris yang bersengketa*, 2016

Esca Sari Ayu Wulandari., *Sanksi Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Tuduhan Tanpa Alat Bukti Dalam Kajian Komparatif Fiqh Jinayah dan Kitab Undang – Undang Hukum Pidana*; Skripsi.

Irma Devita Purnamasari, S.H., M.Kn di akses pada 14 April 2020 dari <https://hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4ecc7cf50640b/empat-golongan-ahli-waris-menurut-kuh-perdata>

IRMA DEVITA, di akses pada 19 April 2020 dari : <https://irmadevita.com/2012/apakah-anak-angkat-anak-adopsi-berhak-mewaris/>

Jurnal Yudisial, penegakan keadilan dalam kewarisan beda agama,.vol.8 no. 3 Desember 2015

KANTOR PENGACARA di akses pada 20 April 2020 dari :<https://kantorpengacara.co/bagaimana-status-kewarisan-anak-angkat-di-mata-hukum/>

MATERI HUKUM,22 feb 2014,di akses pada 15 April 2020 dari <http://hukuum.blogspot.com/2014/02/pengertian-sengketa-perdata.html>

Muchlisin Riadi 23 Okt, 2018 di akses pada 14 April 2020 dari<https://www.kajianpustaka.com/2018/10/pengertian-jenis-penyebab-dan-penyelesaiansengketa.html>

Ny. Retnowulan Sutantio,S.H. dan Iskandar Oeripkartawinata, S.H. HUKUM ACARA PERDATA dalam teori dan praktek

Peter Mahmud Marzuki, pengantar ilmu hukum , kencana, jakarta, 2008.

Prof. Abdulkadir Muhammad, S.H., *Hukum Perdata Indoensia*, PT Citra Aaditya Bakti, Bandung : 2014

SEMA nomor 2 tahun 1979, tentang pengangkatan anak

Soepomo, Bab- bab tentang hukum adat, penerbitan universitas , Jakarta,1996

Staatsblad 1917 nomor 129,

Suparno Usman, *Fiqh Mawaris Hukum Kewarisan Islam*,Gaya Media Pratama, Jakarta, 2006,

Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang perlindungan anak

Wijayanti, Konsep dasar pendekatan, 2015 di akses pada 3 mei 2020 dari : <http://20305891.siap-sekolah.com/2015/05/13/konsep-dasar-pendekatan-strategi-metode-teknik-taktik-dan-model-pembelajaran/#.XrFlxagza00>

Wirjono Prodjodikoro, hukum perdata tentang persetujuan tertentu, sumur bandung,bandung,1991